

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS

Asti Sasmitha

Email: astisa2401@gmail.com

Dra. Sulistyowati, M.Si

Dr. Supratiwi, S.Sos, M.Si

ABSTRAK

Implementasi kebijakan pengembangan Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur dalam komunikasi sudah dijalin sangat baik antara pemerintah pusat dengan instansi lainnya, sumber daya manusia yang ada bersikap jujur berkomitmen dan masih bersinergi dalam bekerja namun masih ditemukan sumber daya manusia yang memiliki kurang pengetahuan dalam pengembangan pariwisata dan tidak terdapat masalah anggaran. Seluruh pegawai baik Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur, balai Taman Nasional Way Kambas, dan instansi terkait sudah bersikap jujur, berkomitmen, dan demokratis, dan dalam pengembangan kawasan pariwisata Taman Nasional Way Kambas tidak memiliki SOP mengenai kerja sama. Factor pendukung yang dihadapi adalah koordinasi yang baik antar instansi, adanya zona pemanfaatan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wisata, dan komitmen pegawai dalam mengembangkan objek wisata Taman Nasional Way Kambas. Sedangkan, faktor penghambat yang di hadapi antara lain kurangnya kualitas sumber daya atau pegawai, kurangnya bantuan dari pihak ketiga atau mitra swasta, dan kurangnya anggaran untuk merawat dan memelihara fasilitas yang ada.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengembangan, Wisata

ABSTRACT

Implementation of the Way Kambas National Park development policy in East Lampung Regency in communication has been very well established between the central government and other agencies, the existing human resources are honest, committed and still synergize in their work, but there are still human resources who have less knowledge in tourism development and there are no budget problems. All employees of the Pariwisata Office of East Lampung Regency, Way Kambas National Park hall, and related agencies have been honest, committed, and democratic, and in developing the Way Kambas National Park tourism area there is no SOP regarding cooperation. The supporting factors Regency are good coordination between agencies, the existence of a utilization zone that can be utilized for tourism development, and employee commitment in developing Way Kambas National Park attractions. Meanwhile, the inhibiting factors faced in the development of Way Kambas National Park in East Lampung Regency include the lack of quality resources or employees, lack of assistance from third parties or private partners, and lack of budget to maintain and maintain existing facilities.

Keywords: Implementation, Policy, Development, Tourism

A. Pendahuluan

Berdasarkan prasurvey yang dilakukan dalam pelaksanaan pengembangan Taman Nasional Way Kambas, khususnya di Pusat Konservasi Gajah (PKG) masih belum optimal. Seperti pada saat memasuki liburan, Taman Nasional Way Kambas tersebut dipenuhi oleh kendaraan bermotor dan parkir yang belum teratur. Penjagaan yang belum maksimal di lokasi tersebut terutama saat malam hari sehingga banyak dimanfaatkan untuk kegiatan yang kurang baik terutama yang dilakukan anak remaja. Selain itu, infrastruktur yang belum berjalan dengan maksimal dan masih adanya jalan yang lubang sehingga membuat pengunjung merasa kurang nyaman dalam melakukan kegiatan pariwisata tersebut. Selain pengelolaan infrastruktur terutama parkir juga terdapat adanya pembangunan sarana pendukung di Taman Nasional Way Kambas yang masih sangat minim. Sehingga apabila wisata tersebut tidak dikembangkan dan dikelola dengan baik maka dapat mengakibatkan suasana wisata tersebut sepi pengunjung. Selain itu, hal tersebut juga dipengaruhi oleh kurangnya anggaran dari Pemerintah dalam pengembangan Taman Nasional Way Kambas karena membutuhkan anggaran yang besar untuk pengembangan wisata Taman Nasional Way Kambas.

Padahal kebijakan pengembangan kawasan pariwisata telah diatur dalam Pasal 60 ayat 3 Peraturan Daerah Lampung Timur No 4 Tahun 2012 yang berbunyi untuk mewujudkan suatu kawasan pariwisata maka harus dilakukan diversifikasi atau pengembangan

objek-objek wisata. Selain itu, dalam Pasal 52 huruf c Peraturan Daerah Lampung Timur No 4 Tahun 2012 juga menyatakan bahwa tema utama kawasan Wisata Unggulan Taman Nasional Way Kambas adalah wisata alam minat khusus yang mutlak harus dijaga kelestariannya. Jelas bahwa wisata Taman Nasional Way Kambas harus dijaga dan dilestarikan atau dikelola dengan baik. Dalam hal ini maka pemerintah dan swasta sangat berperan dalam mengembangkan objek wisata tersebut.

Peran pemerintah sebagai salah satu tindakan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya. Sehingga tindakan maupun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Pengelolaan pariwisata mempunyai sumber penggerak terkait dengan peningkatan kunjungan wisatawan. Akan tetapi pengembangan pariwisata dapat membangun semangat kebangsaan dan apresiasi terhadap kekayaan seni budaya bangsa. Pemerintah memiliki peran dalam membuat regulasi maupun kebijakan, karena dengan adanya kebijakan tersebut dalam perencanaan jangka panjang diperlukan oleh pemerintah (Kuwena & Widyatmaja, 2017). Tentunya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor pendukung pemerintah dalam mengembangkan Taman Nasional Way Kambas. Dalam mendukung pengembangan

Taman Nasional Way Kambas pemerintah telah menyediakan berbagai macam fasilitas.

Dalam merencanakan pengembangan objek wisata tersebut harus juga dapat mengintegrasikan pengembangan objek wisata tersebut dalam program-program yang telah ditetapkan serta rencana tersebut harus mampu memberikan perubahan yang lebih baik dalam proses pengembangan pariwisata supaya dapat tercapainya suatu tujuan objek pariwisata yang mempunyai daya tarik dan daya jual baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mengacu pada uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan dalam pengelolaan Taman Nasional Way Kambas dengan Judul: **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Taman Nasional Way Kambas”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat pengembangan objek wisata Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur?

C. Kerangka Teori

Implementasi Kebijakan

Winarno (2012) berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan,

keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dimaknai bahwa implementasi kebijakan publik adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan antar stakeholder yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat yang merupakan realisasi dari suatu kebijakan publik untuk menghasilkan suatu hasil, dampak dan manfaat bagi masyarakat yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi Kebijakan menurut George C Edward III dalam Widodo, (2010) implementasi kebijakan di bedakan menjadi 4 variabel yaitu:

1) Komunikasi

Ada tiga indikator yang dapat kita pakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu: Transmisi, dimana cara penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik. Yang kedua yaitu kejelasan dimana dalam indikator ini komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Yang terakhir yakni konsistensi dimana perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk dijalankan.

- 2) **Sumber Daya**
Meskipun suatu kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila dalam pengimplementasiannya kekurangan sumber daya untuk melaksanakan dan menjalankan, maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Dalam sumber daya terbagi dari beberapa sumber daya seperti sumber daya manusia dan sumber daya finansial.
- 3) **Disposisi**
Disposisi yaitu menunjuk karakteristik yang erat hubungannya dengan implementor kebijakan. Karakterer yang sangat penting dimiliki oleh seorang implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.
- 4) **Struktur Organisasi**
Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bersumber data-data. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan prosedur penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah (Moeloeng, 2007) Teknik pengumpulan data penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa cara seperti observasi,

wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ada beberapa tahap seperti reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

E. Pembahasan

Pengembangan wisata tersebut dilakukan untuk menjaga Taman Nasional Way Kambas serta membantu masyarakat sekitar desa. Keberadaan taman nasional way kambas yang sering dikunjungi oleh para wisatawan membuka peluang kepada masyarakat sekitar untuk memperoleh penghasilan. Sebagai contoh yang ada sampai saat ini yaitu adanya warung-warung kecil yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berjualan baik itu makanan, minuman, pakaian, aksesoris dan lain sebagainya. Selain dari berjualan ada juga yang menyediakan jasa foto langsung jadi, hal ini yang sering mendapat permintaan dari pengunjung berfoto dengan gajah, berfoto naik gajah, dan lain-lainnya. Dalam penjelasan Pasal 64 ayat (2) dan (4) Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 – 2031 menjelaskan bahwa perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya berupa kawasan suaka marga satwa dengan melakukan pengelolaan kawasan penyangga di sekitar Taman Nasional Way Kambas melalui pengembangan budidaya tanaman keras. Selain itu, dalam Pasal 75 juga menjelaskan bahwa perwujudan kawasan strategis nasional berupa kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu penetapan Taman

Nasional Way Kambas dan sekitarnya.

Berdasarkan pasal di atas jelas bahwa pengembangan atau pengelolaan wisata Taman Nasional Way Kambas tetap harus menjaga kelestarian alam dan cagar budaya Taman Nasional Way Kambas. Namun, pengembangan wisata yang tidak sesuai dengan kebijakan tersebut dikarenakan pengembangan wisata yang mana dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana secara terus menerus akan dapat membuat hilangnya habitat satwa tersebut secara terus menerus. Kurangnya minat pengembangan taman nasional ini menjadi suatu yang dapat dibanggakan sebagai tempat pengembangan pariwisata dan tujuan wisata selain pusat latihan Gajah di kawasan taman Nasional Way Kambas.

Membahas mengenai implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan bahwa makna implementasi yakni, pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi bisa juga dalam bentuk suatu perintah atau keputusan-keputusan yang sumbernya dari eksekutif atau keputusan lembaga peradilan. Biasanya, keputusan tersebut menjelaskan tentang suatu masalah yang ingin di atasi, menjelaskan secara jelas tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur bagaimana proses untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sedangkan Menurut Ripley dan Franklin menyebutkan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi

setelah undang-undang ditetapkan keluaran yang nyata.

Dengan pengertian-pengertian di atas yang dimaksud dengan implementasi adalah adalah suatu kegiatan yang sudah terencana yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan dilengkapi oleh sarana prasarana yang mendukung berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam membahas implementasi kebijakan pengembangan Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur mengacu pada teori George C Edward III dengan menganalisis implementasi kebijakan dengan 4 variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Menurut George C Edward III dalam Widodo (2010) komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan atas pencapaian tujuan dari sebuah implementasi dan menurutnya implementasi yang efektif adalah apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka implementasikan. Hasil penelitian menemukan bahwa komunikasi dijalin sangat baik antara pemerintah pusat dengan instansi lainnya dalam hal ini baik dari Balai Taman Nasional Way Kambas dan Dinas Pariwisata menghasilkan hasil kerja sama yang baik. Kerja sama antara way kambas dan Dinas Pariwisata dalam rangka pengembangan kawasan pariwisata dan guna menunjang kenyamanan serta ketertarikan wisatawan yang datang maka

pihak Way Kambas dan Dinas Pariwisata Saling berkoordinasi dalam hal seperti melakukan penyusunan set plan tindak pengembangan kawasan ekowisata dan sekitarnya yang didalamnya termasuk batasan wilayah dan zona kawasan pemanfaatan kegiatan pariwisata di Way Kambas, penyediaan sarana informasi menuju Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya, menyediakan bantuan medis untuk para wisatawan dan aparat penjaga pos penjagaan di dalam kawasan Taman Nasional Way Kambas.

Berdasarkan lampiran Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 – 2031 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan Taman Nasional Way Kambas sebagai kawasan pelestarian alam dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi instansi yang berperan penting dalam hal ini adalah Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementrian Kehutanan, dan Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Kabupaten. Sedangkan, instansi yang mendukung dalam pelaksanaan pengelolaan wisata tersebut adalah Balai Taman Nasional Way Kambas, Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Tanggungjawab pengelolaan wisata Taman Nasional Way Kambas adalah Kementerian Kehutanan. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang ada di lampiran Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 – 2031.

Arahan dan sosialisasi tentang kerja sama antara Taman Nasional Way Kambas yang berada langsung dalam naungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dengan Dinas Pariwisata mengenai pengembangan kawasan wisata telah dikomunikasi kepada seluruh pegawai yang ada di way kambas dengan baik. Semua pegawai yang bertugas juga telah melaksanakan kerjasama tersebut dengan baik, akan tetapi dikarenakan memang ada peraturan yang telah di buat dan disepakati oleh pengelola way kambas mengenai zona pemanfaatan untuk kawasan pariwisata membuat pengembangan wisata yang ada di way kambas hanya bisa dilakukan didaerah atau di zona yang memang sudah ditentukan. sehingga tidak dapat untuk menambah atau membuat pengembangan kawasan wisata diluar zona yang sudah ditentukan. Dikarenakan taman nasional way kambas sendiri bukan di khususkan untuk tempat wisata melainkan lebih ke pusat konservasi dan suaka alam seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 – 2031 bahwa pengelolaan Taman Nasional Way Kambas diupayakan untuk tidak tetap menjaga kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sekitar maka dalam hal ini instansi utama ataupun instansi pendukung dalam pengelolaan wisata telah melakukan komunikasi dengan baik. Pasal 78 ayat (2) juga menjelaskan bahwa arahan pengendalian pemanfaatan ruang pada objek wisata dilakukan melalui ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disentif, serta ketentuan sanksi. Hal ini komunikasi harus dikoordinasikan dengan baik oleh Kementerian Kehutanan dikarenakan Kementerian Kehutananlah yang lebih mengetahui secara persis zona pemanfaatan ruang yang boleh atau tidak dilakukan pembangunan sarana agar tetap menjaga kelestarian Taman Nasional Way Kambas.

2. Sumber daya

George C Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa sumberdaya sangat penting dalam implementasi kebijakan, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya

tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya berdasarkan lampiran Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 dalam pengelolaan Taman Nasional Way Kambas instansi yang berperan penting dalam hal ini adalah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kehutanan, dan Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Kabupaten. Sedangkan, instansi yang mendukung dalam pelaksanaan pengelolaan wisata tersebut adalah Balai Taman Nasional Way Kambas, Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Pihak Dinas Pariwisata Lampung Timur mengatakan bahwa:

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran dan perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian

yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tangannya. (Widodo, 2010) Terkait dengan implementasi kebijakan pengembangan Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur sumber daya manusia yang ada bersikap jujur, berkomitmen dan masih bersinergi dalam bekerja namun masih ditemukan sumber daya manusia yang memiliki kurang pengetahuan dalam pengembangan pariwisata tetapi hal tersebut sudah diatasi yaitu dengan adanya program latihan dan bintek (bimbingan teknis) mengenai pengembangan pariwisata dan pemasaran.

Pengembangan Taman Nasional Way Kambas sumber daya manusia masih dirasa kurang dalam promosi dan menarik pihak swasta untuk bekerja sama untuk melakukan pengembangan wisata. Namun, sumber daya manusia yang ada di Taman Nasional Way Kambas pun sudah cukup memadai dan berkompeten untuk menjalankan kerja sama dan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata, hal ini dikarenakan Kementerian Perhutanan dan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung sudah membuat program pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan pengetahuan

dan wawasan sumber daya manusia khususnya mengenai peraturan terkait dengan pengembangan objek Wisata Taman Nasional Way Kambas karena dalam pengelolaan wisata TNWK berbeda dengan objek wisata lainnya. Hal ini seperti yang telah diungkapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 – 2031. Hanya saja seperti yang dijelaskan sebelumnya ada beberapa kendala yang memang di luar dari sumber daya manusia seperti pada promosi dan pemasaran hasil dari pelatihan masyarakat. Promosi lebih diutamakan dalam pengembangan wisata Way Kambas karena jika pengembangan dilakukan dengan melakukan pengembangan terus-menerus akan merusak ekosistem atau ciri khas dari Taman Nasional Way Kambas.

b. Sumber daya finansial

Menurut George C Edward III dalam Widodo (2010) sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan terhadap publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga

terbatas. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku rendah bahkan akan terjadi goal displacement yang dilakukan oleh pelaku terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam anggaran Dinas Pariwisata Lampung Timur merasa sudah baik karena Dinas Kabupaten atau Provinsi masih bersinergi dengan taman nasional way kambas tentang masalah pembangunan fisik, jadi jika terdapat masalah anggaran itu Dinas Pariwisata Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Balai Taman Nasional Way Kambas dengan melakukan rapat koordinasi.

sumber daya baik manusia ataupun finansial yang ada di Way Kambas masih dirasa kurang dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan wisata khususnya pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 – 2031 dikarenakan sumber daya manusia baik dari Dinas Pariwisata ataupun Balai Taman Nasional Way Kambas hanya mengacu pada pembangunan sarana dan prasarana saja padahal hal itu melanggar kebijakan yang ada sehingga dalam hal ini mereka hanya membutuhkan SDM yang lebih menguasai mengenai promosi untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang

Wisata TNWK dan tertarik untuk datang mengunjunginya.

3. Disposisi

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. George C Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif. Hasil penelitian menemukan bahwa secara koordinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur sebenarnya tidak secara langsung melakukan pengembangan di Taman Nasional Way Kambas karena Kementerian Perhutananlah yang bertanggungjawab atas itu. Namun, pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur selalu berkoordinasi dan melakukan penyingkronan dalam pengembangan wisata Taman Nasional Way Kambas. Seluruh pegawai baik Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur, balai Taman Nasional Way Kambas, dan instansi terkait sudah bersikap jujur, berkomitmen, dan demokratis dalam pelaksanaan kebijakan

pengembangan Taman Nasional Way Kambas.

4. Struktur Birokrasi

Menurut George C Edward III dalam Widodo (2010) struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam pengembangan kawasan pariwisata Taman Nasional Way Kambas tidak memiliki SOP mengenai kerja sama antara Taman Nasional Way Kambas dan Dinas Pariwisata, dikarenakan memang kerja sama tersebut tidak ada dalam perjanjian tertulis serta mengingat bahwa Taman Nasional Way Kambas bukan di khususkan untuk tempat pariwisata Way Kambas hanya membuat zona pemanfaatan yang dapat digunakan para wisatawan yang ingin berpariwisata di Way Kambas, Taman Nasional Way Kambas lebih menekankan pada fungsinya yakni kawasan pelestarian alam dan suaka

margasatwa sehingga Taman Nasional Way Kambas hanya membuat SOP yang berkaitan dengan Undang-Undang kehutanan.

Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi dalam pengembangan Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

1. Faktor pendukung

Hasil penelitian menemukan bahwa faktor-faktor pendukung yang di hadapi dalam pengembangan Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur antara lain:

a. Koordinasi yang baik antar instansi

Koordinasi dilakukan dengan baik antar instansi, dimana komunikasi dijalankan dengan intensitas yang baik antar instansi yaitu Dinas Kepariwisata, Balai Taman Nasional Way Kambas, Kementerian Perhutanan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan instansi lainnya selalu menjalin komunikasi yang baik dan selalu mengadakan rapat koordinasi ketika menyelesaikan masalah.

b. Adanya zona pemanfaatan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wisata

Zona pemanfaatan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wisata telah membuat aturan tentang pembuatan zona pemanfaatan yang mana zona pemanfaatan tersebut digunakan untuk pengunjung

yang ingin berwisata ke Taman Nasional Way Kambas. Taman Nasional Way Kambas adalah salah satu dari dua Taman Nasional yang ada di Lampung.

- c. Komitmen pegawai dalam mengembangkan objek wisata Taman Nasional Way Kambas

Pegawai dari instansi terkait baik dari Dinas Kepariwisata, Balai Taman Nasional Way Kambas, Kementerian Perhutanan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan instansi lainnya memiliki komitmen dalam mengembangkan objek wisata Taman Nasional Way Kambas dimana pegawai bekerja dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan objek wisata Taman Nasional Way Kambas menjadi lebih nyaman untuk dikunjungi.

2. Faktor penghambat

Hasil penelitian menemukan bahwa faktor-faktor penghambat yang di hadapi dalam pengembangan Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur antara lain:

- a. Kurangnya kualitas sumber daya atau pegawai

Kualitas sumber daya atau pegawai dalam pengembangan Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur dirasa kurang berupa mempromosikan wisata Way Kambas. Pegawai kurang

menguasai media social yang berkembang sekarang padahal media social merupakan media paling penting dalam meningkatkan pengunjung di zaman sekarang ini.

- b. Kurangnya bantuan dari pihak ketiga atau mitra swasta

Pihak ketiga dalam pengembangan Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur penting untuk peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar Taman Nasional Way Kambas. Namun, dalam pengembangan Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur bantuan dari pihak ketiga atau mitra swasta masih kurang sejauh ini hanya satu perusahaan swasta yang bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Way Kambas yaitu PT Gajah Makmur Bersama. Pihak swasta sebagai pihak bisnis mempunyai peran penting dalam pengelolaan pengembangan objek wisata.

- c. Kurangnya anggaran untuk merawat dan memelihara fasilitas yang ada

Sarana dan prasarana tidak dirawat dengan baik, hal ini dikarenakan kurangnya anggaran inilah Kondisi anggaran dari pemerintahan pusat masih terbatas, membuat balai Taman Nasional Way Kambas harus mencari mitra swasta untuk bekerjasama

dalam mengembangkan objek wisata dengan baik. Namun, sejauh ini masih satu sector swasta yang bekerjasama dalam pengembangan wisata Taman Nasional Way Kambas, itupun masih dalam tahap perjanjian belum pelaksanaan karena adanya pandemi Covid-19 pengembangan belum dapat dilaksanakan.

F. Penutup

Implementasi kebijakan pengembangan Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur sudah baik. Hal ini dapat dilihat pada factor implementasi kebijakan teori George C Edward III dengan menganalisis implementasi kebijakan dengan 4 variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut penjelasannya 1) komunikasi yang dijalin sudah baik antara pemerintah pusat dengan instansi lainnya dalam hal ini baik dari Balai Taman Nasional Way Kambas dan Dinas Pariwisata menghasilkan hasil kerja sama yang baik. 2) sumber daya manusia yang ada bersikap jujur berkomitmen dan masih bersinergi dalam bekerja namun masih ditemukan sumber daya manusia yang memiliki kurang pengetahuan dalam pengembangan pariwisata dan anggaran Dinas Pariwisata Lampung Timur merasa sudah baik karena Dinas Kabupaten atau Provinsi masih bersinergi dengan taman nasional way kambas tentang masalah pembangunan fisik, jadi jika terdapat masalah anggaran. 3) seluruh pegawai baik Dinas Pariwisata Kabupaten

Lampung Timur, Balai Taman Nasional Way Kambas, dan instansi terkait sudah bersikap jujur, berkomitmen, dan demokratis dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan Taman Nasional Way Kambas. Masalah yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat yang ada di sekitar kawasan pariwisata Taman Nasional Way Kambas para pegawai dan dinas pariwisata telah bekerja sama dengan baik, dengan cara selalu memantau apa saja yang menjadi kebutuhan dan peluang usaha yang ada di sekitar tempat wisata yang ada di Taman Nasional Way Kambas. 4) pengembangan kawasan pariwisata Taman Nasional Way Kambas tidak memiliki SOP mengenai kerja sama antara Taman Nasional Way Kambas dan Dinas Pariwisata, dikarenakan memang kerja sama tersebut tidak ada dalam perjanjian tertulis serta mengingat bahwa Taman Nasional Way Kambas bukan di khususkan untuk tempat pariwisata Way Kambas hanya membuat zona pemanfaatan yang dapat digunakan para wisatawan yang ingin berpariwisata di Way Kambas.

Faktor pendukung yang di hadapi dalam pengembangan Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur adalah koordinasi yang baik antar instansi, adanya zona pemanfaatan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wisata, dan komitmen pegawai dalam mengembangkan objek wisata Taman Nasional Way Kambas. Sedangkan, faktor penghambat yang di hadapi dalam pengembangan Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur antara lain kurangnya kualitas sumber daya atau

pegawai, kurangnya bantuan dari pihak ketiga atau mitra swasta, dan kurangnya anggaran untuk merawat dan memelihara fasilitas yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2008. Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi. Politik. Jakarta: Suara Bebas.
- Ari, Rakatama, Kontribusi Aktivitas Wisata Alam Di Taman Nasional Way Kambas Terhadap Perekonomian Setempat (The Contribution of Natural Tourism Activity in Way Kambas National Park to Local Economics), (Lampung: Balai Konservasi Sumberdaya Alam), jurnal info hutan Vol. V No. 1 : 89-98, 2008
- Arifin Rudyanto, Kerangka Kerjasama Dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut, Disampaikan pada Sosialisasi Nasional Program MFCDP, 22 September 2004.
- Budiharto, Widodo. 2010. Robotika – Teori dan Implementasinya. Yogyakarta: Andi.
- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. “Laporan Akhir Penyusunan Desain Tapak Pusat Konservasi Gajah di Taman Nasional Way Kambas.
- Fajriah, S. D. (2014). Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Pariwisata Pantai yang Berkelanjutan (Studi Kasus : Kawasan Pesisir Pantai Wonokerto Kabupaten Pekalongan), 10(2), 218– 233.
- Fickyana Setyaratih. Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Museum (Stdi Kasus Museum Sonobudoyo Yogyakarta). Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Fijriani, Mona. “Revitalisasi Pusat Konservasi Gajah Di Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur.”
- Ghani, Yosef Abdul. Pengembangan Sarana Prasarana Destinasi Pariwisata Berbasis Budaya di Jawa Barat. Jurnal Pariwisata, Vol. IV No. 1 April 2017.
- Heradz Gumilang, Unu Nitibaskara, dan Abdul Rahman Rusli. “Pengembangan Kegiatan Ekowisata Di Taman Nasional Way Kambas Provinsi Lampung (Studi Kasus : Pusat Konservasi Gajah)”.
- Istianah, Nurul. “Usaha Pengembangan Objek Wisata Taman Nasional Way Kambas Terhadap Pendapatan Masyarakat

- (Studi Kasus di Objek Wisata Way Kambas Kec. Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)”.
 Kambas sebagai Destinasi Wisata di Lampung. Domestic Case Study. Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta. 2018.
- Jaffe, E., & Pasternak, H. 2004. *Developing Wine Trails As A Tourist Attraction In. Israel. International Journal of Tourism Research*, 6(4)
- Mustika, Windi, dkk. “Potensi Wisata Taman Nasional Way Kambas Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013”.
- Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
- Mutia Herlita Putri. “Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Kawasan Pariwisata Di Taman Nasional Way Kambas Lampung. Jurusan : Pemikiran Politik Islam”.
- Kusumanegara, Solahuddin, 2010. Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan. Publik, Edisi Pertama, Gava Media, Yogyakarta.
- Nurul Istianah. “Usaha Pengembangan Objek Wisata Taman Nasional Way Kambas Terhadap Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus di Objek Wisata Way Kambas Kec. Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)”. Dalam Wawancara dengan Bapak Subakir selaku Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas pada tanggal 29 Oktober 2017.
- Masyono, Superda A. “Strategi Pengembangan Sektor Kepariwisata Di Kabupaten Lampung Timur”. Vol. 9 No.1, April 2015.
- Primadona, Gusti Indah. Perancangan Kawasan Terpadu Wisata Alam dan Budaya. Jurnal Arsitektur Universitas Bandar Lampung, juni 2011
- Miftahudin, Gunardi Djoko Winarno, Trio Santoso, dan Arief Darmawan. Analisis Obyek Daya Tarik Wisata (Odtw) Dan Interpretasi Jalur Ekowisata Elephant Tour Di Pusat Latihan Gajah Taman Nasional Way Kambas, Jurnal Hutan Tropis Volume 9 No. 2 Juli 2021.
- R, Basiya & Rozak, Hasan Abdul. 2012. Kualitas Daya Tarik Wisata dan Niat Kunjungan Kembali Wisatawan
- Mulyadi, Deddy, 2015, Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung: Alfabeta.
- Murti, Sulih Andoyo. Daya Tarik Taman Nasional Way

- Mancanegara di Jawa Tengah. (Jurnal Dinamika Kepariwisata Vol. XI No. 2, Oktober 2012)
- Rencana Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Way Kambas, Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2023, 2018, YOSL/OIC-PILI.
- Rostiyati, Ani. 2013. Potensi Wisata di Lampung dan Pengembangannya. Patanjala Vol. 5 No. 1.
- Setiawan, Rony Ika. Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang. Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN) Vol. 1 No. 1.
- Soebiyantoro, U., Doktoral, P., Manajemen, I., & Brawijaya, U. (2008). Pengaruh ketersediaan sarana prasarana, sarana transportasi terhadap kepuasan wisatawan.
- Subangkit, Lulu Samsul Bakri, dan Susni Herwanti. “Faktor-Faktor Kepuasan Pengunjung Di Pusat Konservasi Gajah Taman Nasional Way Kambas Lampung”.
- Suwena, I Ketut dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, 2017, Pengetahuan Dasar Ilmu Parawisata, Pustaka Larasan, Bali.
- Tina. “Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pulau Cempa Cambang Kabupaten Pangkep”. Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar. 2019.
- Usman Sunyoto. 2004. “Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Waykambas.org